



Penguatan Civic Literacy dalam Membentuk Ketahanan Guru PPKn

Monica Tiara^{1*}, Irwan², Muhajir³

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

³ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

^{1*} monicatiara@unp.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received 15th January 2024

Revised 24th February 2024

Accepted 3rd March 2024

Keywords:

Kompetensi
Kewarganegaraan,
Civic Literasi,
Pendidikan Pancasila
dan
Kewarganegaraan,
Ketahanan Guru

One of the challenges in Indonesia's education is civic literacy. The concept of civic literacy can be a filter for citizens in dealing with various civic issues, especially in the field of education. Therefore, strengthening civic literacy needs to be given to civic education teachers to shape students into global-minded citizens. This article aims to analyze the strengthening of civic literacy in building the resilience of civics teachers, especially in facing post-pandemic era. This research was analyzed using qualitative methods with high school civic education teachers in Padang City as research informants. Data collection techniques were carried out by distributing digital questionnaires, observation and interviews. The research results show that civic literacy plays an important role in strengthening teacher resilience. Civic literacy helps teachers sort information according to their mental and physical needs to adapt to post-pandemic learning. Through civic literacy, teachers are able to link civic issues with learning material and provide space for students to think critically. At the end of the research, it was revealed that strengthening civic literacy in building the resilience of civic education teachers in post-pandemic conditions has implications for increasing teacher self-confidence and teacher professional competence.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Monica Tiara

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

monicatiara@unp.ac.id

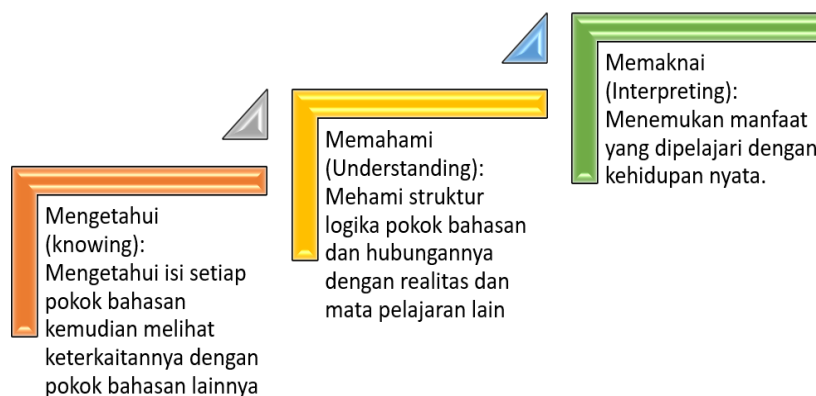
PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses digital berimplikasi pada banyaknya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan istilah *information explosion* atau ledakan informasi yang berarti bahwa keadaan dimana informasi yang ada dalam masyarakat melimpah atau sulit dikendalikan. *Information explosion* yang terjadi pada suatu negara sejatinya memiliki dampak negatif apabila tidak disertai dengan kemampuan literasi yang memadai. Rendahnya tingkat kemampuan literasi dapat menimbulkan disinformasi dan menyebarnya berita bohong dalam masyarakat (Novianto Puji Raharjo, 2021).

Berdasarkan hasil survey dari World's Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, memperlihatkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Posisi ini persis berada di bawah Thailand yang menduduki peringkat ke-59 dan di atas Botswana di peringkat ke-61. Sejalan dengan hasil survey tersebut, Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2019 juga memperlihatkan ranking negara Indonesia yang rendah, yaitu: ranking ke 62 dari 70 negara.

Rendahnya hasil survey literasi masyarakat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan berhubungan erat dengan motivasi membaca dan kemampuan menganalisis suatu bacaan. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar bagi seorang peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan dalam menguasai mata pelajaran (Dalimunthe, 2019). Literasi juga berhubungan dengan tuntutan mata pelajaran atau kebutuhan lingkungan perkembangan peserta didik. Tuntutan tersebut menyesuaikan dengan karakteristik setiap mata pelajaran yang secara eksplisit digambarkan melalui indikator pencapaian kompetensi (IPK) dan tujuan pembelajaran.

Kompetensi literasi pada setiap mata pelajaran dikembangkan dengan tiga tahapan yakni; mengetahui (*knowing*), memahami (*understanding*) dan memaknai (*interpreting*). Secara grafis disajikan melalui gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan kompetensi literasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Kompetensi literasi yang ditunjukkan pada gambar diatas menjelaskan bahwa literasi tidak hanya bersandar pada pemahaman kata dan struktur bahasa tetapi juga pemaknaan teks. Artinya secara tekstual dan konseptual kompetensi literasi dipahami secara bertingkat dan kompleks. Hal inilah yang perlu dikembangkan oleh setiap guru mata pelajaran khususnya mata pelajaran PPKn. Budaya literasi dikembangkan sejalan dengan aktivitas penanaman pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Melalui pengembangan *civic knowledge* diharapkan siswa dapat mengetahui, memahami serta mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari proses literasi tersebut. Tindakan ini diharapkan agar siswa dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) yang paham akan hak dan kewajibannya.

Pada mata pelajaran PPKn literasi tidak hanya sekedar dibudayakan tetapi menjadi kompetensi yang harus dibangun melalui konsep *civic literacy*. *Civic literacy* merupakan upaya pengembangan kemampuan warganegara dalam memecahkan permasalahan kenegaraan secara kritis, bertanggung jawab dan otonom (Raharjo, 2017). Kompetensi *civic literacy* membantu guru mempersiapkan pembelajaran yang lebih demokratis dan dapat mengaktifkan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Totok Suyantoa, 2018).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru PPKn khususnya menghadapi dinamika pembelajaran pasca pandemi. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 pembelajaran dilaksanakan jarak jauh dengan *platform* digital. Kondisi tersebut membuat kebiasaan baru dalam pembelajaran yakni kemampuan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan mengaitkannya dengan isu-isu kewarganegaraan menjadi terhambat. Hambatan ini dilihat karena kebiasaan yang selama ini terbangun adalah pembelajaran dianggap akan lebih berhasil apabila objek yang dipelajari merupakan objek nyata di lingkungan sekitarnya. Sehingga pembelajaran melalui visualisasi terhadap objek di lingkungan sekitar harus direalisasikan agar dapat dengan mudah mengklarifikasi pemahaman, meningkatkan minat, dan keterlibatan nyata peserta didik.

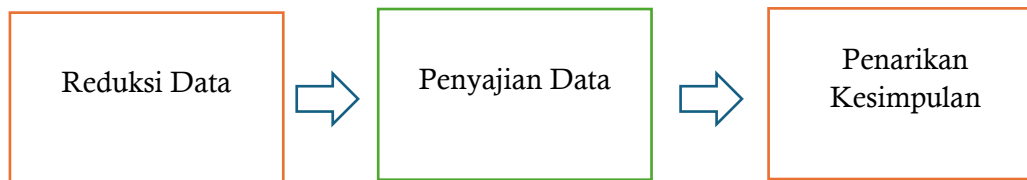
Terjadinya perbedaan yang mencolok antara pembelajaran tatap muka dengan jarak jauh menggunakan platform digital mengharuskan guru memiliki ketahanan dalam proses pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sehingga guru dituntut harus dapat mempersiapkan diri mengembangkan komponen *civic literacy* agar mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan berwawasan global. Kompetensi kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Cholisin, 2010). Kompetensi tersebut menjadi faktor penentu terwujudnya peserta didik menjadi *smart and good citizen*. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana penguatan *civic literacy* dapat berpengaruh pada ketahanan guru pada masa pandemi dan pasca pandemi di SMA di Kota Padang?

METODE

Artikel ini dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena diasumsikan dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi melalui langkah-langkah ilmiah (Moleong, 2014). Penggunaan metode ini diharapkan untuk mendapatkan data secara komprehensif terkait penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru PPKn khususnya menghadapi dinamika kenegaraan pasca pandemi. Data dikumpulkan dengan teknik survey observasi, wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*) dan studi dokumentasi dalam kurun waktu 6 bulan. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri di Kota Padang, yakni; SMAN 1

Padang, SMAN 10 Padang, SMAN 7 Padang, SMAN 8 Padang dan SMAN 16 Padang. Informan penelitian berjumlah 10 orang guru PPKn yang terdiri dari 2 orang guru tiap sekolahnya.

Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yakni; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Almanshur, 2016). Berikut tahapan analisis data melalui teknik Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994):



Gambar 2. Gambaran tahapan analisis data Teknik Miles dan Huberman

Gambaran diatas menjelaskan tahapan analisis data yang diawali dengan tahapan reduksi data. Reduksi data adalah tahap mengelompokkan data. Tahap display data merupakan tahap memilah data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah tahap terakhir untuk menemukan interpretasi data.

Untuk keabsahan data penelitian dalam artikel ini, digunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah kegiatan mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara atau membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen yang sudah ada (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Civic literacy dalam pembelajaran PPKn pada dasarnya menjadi pola yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pola tersebut berguna untuk menganalisis isu-isu kewarganegaraan yang berkembang di suatu negara. Orientasinya terletak pada kemampuan kritis peserta didik yang dimanifestasikan berupa aktivitas kewarganegaraan. Pembelajaran PPKn dengan pendekatan *civic literacy* pada dasarnya dikembangkan untuk memudahkan guru menganalisis keterkaitan konsep dengan kehidupan kenegaraan.

Realitas Pembelajaran PPKn di Masa Pandemi Covid-19

Civic literacy menjadi konstruksi pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan falsafah suatu bangsa. Skill ini sangat dibutuhkan dalam Abad-21 karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik (Dewi, 2020). Sejalan dengan pembelajaran PPKn yang mengarah pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang digariskan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penguatan *civic literacy* bagi guru PPKn dilakukan agar terciptanya seorang guru kreatif yang peka terhadap isu-isu kebangsaan. Guru yang peka terhadap isu kebangsaan diasumsikan dapat mewujudkan pembelajaran PPKn secara demokratis, kritis dan solutif. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan kondisi real dari kehidupan negara menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran PPKn.

Pada masa pandemi covid-19 lalu, pembelajaran dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni; *pertama*, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan platform digital. PJJ dengan platform digital dilaksanakan berdasarkan SE MENDIKBUD No. 36962/MPK.A/HK/2020. SE tersebut memuat

ketentuan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran covid-19. SE ini juga memuat daftar nama platform pembelajaran selama covid-19 sebagai berikut:

Tabel 1. Sarana Pembelajaran Daring

No	Sarana Pembelajaran	Laman
1	Rumah belajar	https://belajar.kemdikbud.go.id
2	<i>Google G Suite for Education</i>	https://edu.google.com/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
3	Microsoft office 365 for education	https://www.microsoft.com/
4	Kelas Pintar: Solusi Belajar Online di Rumah Anda	https://www.kelaspintar.id
5	Quipper School	https://www.quipper.com/id/school/
6	Ruang Guru	https://www.ruangguru.com/
7	Sekolah.mu	https://www.sekolah.mu
8	Zenius Education	https://www.zenius.net

Sumber: (Kemdikbud, 2020)

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat penerapan teknologi dalam pembelajaran memungkinkan dilakukan dan mendukung keterlibatan siswa secara aktif. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dianggap sebagai upaya untuk memanfaatkan ketertarikan alami siswa terhadap *gadget* dan perangkat elektronik. PJJ daring pada mata pembelajaran PPKn melalui platform di atas memudahkan guru dan siswa menemukan sendiri sumber belajar secara mandiri. Dengan kata lain guru tidak perlu melakukan pengawasan seperti pada pertemuan tatap muka. Guru hanya mendampingi siswa secara daring melalui WhatsApp maupun email.

Salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi belajar haruslah memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran harus menjadi alat bantu yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Pemanfaatan media interaktif yang mendukung kegiatan belajar terpusat pada peserta didik (*student center*) akan membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Adapun kekeliruan yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran PPKn bukan saja disebabkan oleh kurangnya keterampilan peserta didik dalam proses belajar PPKn, namun faktor lain yaitu kurangnya pengarahan yang didapat dari guru.

Kedua, pembelajaran tatap muka bersyarat yang dijalankan dengan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB ini menjelaskan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan pemberian izin pemerintahan daerah dilanjutkan dengan izin berjenjang satuan pendidikan dan orang tua (Kemdikbud, 2020). Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
- b) kesiapan guru; kesiapan siswa dan orang tua
- c) penjadwalan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem bergiliran rombongan belajar (rombel) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan dan
- d) pembelajaran secara daring untuk siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka.

Realitas kedua bentuk penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi covid-19 tersebut menghantarkan guru dan siswa untuk melakukan adaptasi baru. Adaptasi tersebut mulai dari perubahan bentuk pembelajaran, peran guru, karakteristik siswa dan cara mendapatkan pengetahuan. Untuk melaksanakan pembelajaran masa pandemi covid-19 guru mempersiapkan diri dengan membuat RPP yang sesuai dengan pembelajaran daring serta belajar menemukan strategi yang tepat untuk berhasilnya pembelajaran (Mthiyane, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang dilaksanakan tatap muka, tetap menggunakan alat bantu media seperti: WhatsApp, gmail dan google meets. Walaupun penggunaannya tidak seintensif pada proses pembelajaran yang menggunakan full daring. Pada WhatsApp group, guru memandu siswa melaksanakan pembelajaran dengan pemberian pengumuman. Guru banyak melakukan pemberian informasi secara tertulis dengan mengirim pesan group. Informasi tersebut berupa jadwal pembelajaran, link pembelajaran google meet, link penugasan google form dan sumber belajar lainnya. Terkadang, WhatsApp group juga digunakan guru untuk bercengkrama dengan siswa dan mendampingi siswa belajar dengan bertanya “Apakah sudah dikerjakan tugasnya?”, “sudah disubmit kah?”, “Apakah ada yang tidak dipahami?”.

Sementara itu, *gmail dan google form* digunakan guru untuk menghimpun tugas-tugas siswa. Siswa diminta untuk mengirimkan tugas lewat *gmail* atau mengumpulkan langsung lewat *google form*. Selain itu, kedua platform ini juga digunakan guru untuk evaluasi pembelajaran. *Google meets* digunakan guru untuk bertatap muka dengan siswa secara daring. Bentuk kegiatan pembelajaran bisa saja berupa ceramah ataupun diskusi. Penggunaan *google meets* tidak dilakukan guru setiap pertemuan hanya saat dibutuhkan saja. Saat guru dan siswa merasa materi pembelajaran sulit untuk dipahami secara mandiri. Namun dalam berbagai penelitian lainnya, kenyataannya guru cenderung melaksanakan pembelajaran dengan memberikan penugasan kepada siswa (Wafiq Mahmudi, 2021).

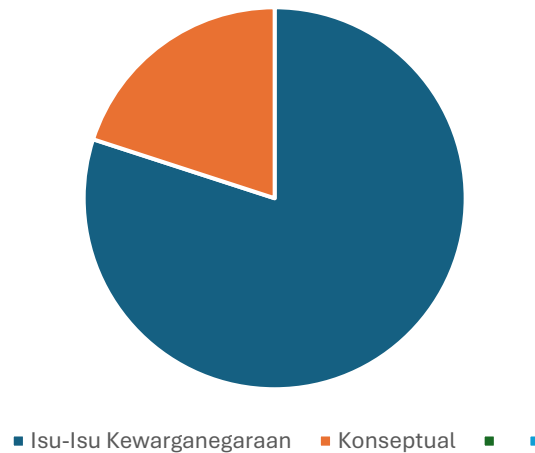
Kemampuan guru untuk menentukan model, strategi dan metode dalam pembelajaran daring juga diiringi dengan kemampuan mengurutkan materi yang disampaikan secara logis sehingga keterkaitan antara topik satu dengan yang lain menjadi jelas. Kemampuan guru dalam mengorganisasikan materi pada pembelajaran daring terdiri dari dua tahap, yaitu memilih materi pembelajaran dan menyusun materi pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka, guru sudah terbiasa untuk melakukan pengorganisasian pembelajaran. Namun, hal yang menjadi kendala adalah ketika pembelajaran berlangsung secara daring. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran daring, miskomunikasi menjadi kendala tersendiri dalam proses pembelajaran. Guru harus memilih materi pembelajaran dengan ekstra agar tidak terjadi miskonsepsi antara guru dan wali murid atau siswa ketika mempelajari materi. Di sisi lain, guru juga harus melihat ketercapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Sehingga pembuatan materi untuk pembelajaran daring harus dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di SMA di Kota Padang, komponen materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran masa pandemi tidak jauh berbeda dengan materi tatap muka sebelum pandemi. Muatan materi pembelajaran tersebut tidak terlepas dari nilai-

nilai Pancasila dan kehidupan kenegaraan (Monica, 2020), yakni: status Pancasila dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Status Pancasila beragam sesuai dengan pemikiran akademik dan politik yang berkembang pada setiap zaman yang melingkupinya. Demikian juga tafsir atau makna dari tiap sila berbeda sesuai dengan statusnya.

Berdasarkan observasi ini, penulis menyarankan agar konsepsi Pancasila sebagai dasar negara berikut tafsirnya dijadikan muatan pembelajaran PPKn. Materi tentang Pancasila sebagai dasar negara telah mendapat pijakan kuat baik melalui pemikiran akademik maupun pemikiran di jalur politik kenegaraan. Hasil survey terhadap guru-guru mengungkapkan bahwa materi pembelajaran PPKn dikelompokkan dalam dua bentuk yakni:

Pembagian Materi Pembelajaran Selama Pandemi



Gambar 3. Grafik Pembagian Materi Pembelajaran Selama Pandemi

Grafik diatas menunjukkan bahwa materi pembelajaran selama pandemi cenderung diberikan dalam bentuk isu-isu kewarganegaraan. Grafik ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama guru PPKn yang mengungkapkan bahwa penggunaan materi berupa isu kewarganegaraan membantu siswa dalam memahami materi. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa siswa cenderung mengalami kebosanan saat diberikan materi konseptual. Materi konseptual diberikan guru dengan cara menugaskan siswa meringkas. Hal ini juga ditemukan dalam hasil penelitian (Muhajir, 2021) yang menunjukkan bahwa siswa cenderung bosan belajar karena pembelajaran ditekankan pada hafalan konsep sehingga siswa tidak mampu menghubungkan materi dengan kenyataan.

Oleh karena itu, (Riskey, 2020) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa guru dalam proses pembelajaran harus memiliki ketahanan dengan memperhatikan: a) diskursif yang memungkinkan diskusi antara siswa dan guru, dimana masing-masing mengungkapkan konsepsinya tentang beberapa aspek yang dijelaskan dan bereaksi terhadap deskripsi yang lain; b) adaptif, dimana guru menyesuaikan interaksi siswa dengan lingkungan yang dialami peserta didik; c) interaktif yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan cara meningkatkan pengalaman mereka; 4) reflektif, dimana siswa merenungkan pengalaman dan menyesuaikan dengan konsepsi mereka sendiri beserta deskripsi mereka tentang hal tersebut.

Penguatan *Civic Literacy* dalam Membentuk Ketahanan Guru PPKn Pasca Pandemi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa selama masa pandemi guru mengemban tugas ganda. Guru harus memastikan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, mempersiapkan proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Disamping itu, guru juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah diikuti dengan kodratnya sebagai sebagai ibu rumah tangga. Data penelitian menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh orang guru yang menjadi informan adalah perempuan. Kondisi ini menempatkan guru “serba sulit”, di satu sisi harus menjadi ibu bagi anaknya, di sisi lain harus menjadi guru bagi siswanya dan menjamin keduanya berjalan lancar. Sehingga guru dituntut untuk memiliki ketahanan yang dapat menciptakan fisik dan mental yang prima.

(Puspita, 2020) mengungkapkan bahwa guru perlu mengelola stressnya dalam pembelajaran masa pandemi karena guru menjadi sumber informasi bagi peserta didik memahami dunia luar. Walaupun pada dasarnya peserta didik dapat menemukan sendiri melalui media digital kondisi kenegaraan yang terjadi. Namun, guru tetaplah menjadi filter informasi bagi siswa.

Hal ini menunjukkan bahwa *civic literacy* berperan penting dalam penguatan ketahanan guru. Peran penting tersebut diwujudkan melalui komponen kajian kewarganegaraan, yakni:

- a) Pengetahuan kewarganegaraan
Pengetahuan kewarganegaraan didapatkan guru secara mandiri dengan mencari sendiri materi pembelajaran dan isu-isu kewarganegaraan. Guru dituntut peka untuk menemukan dan memahami berbagai pemberitaan dan isu-isu kewarganegaraan yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan agar guru dapat menyesuaikan dengan pengetahuan siswa yang cenderung sangat cepat perkembangannya.
- b) Sikap kewarganegaraan
Kepekaan guru terhadap isu-isu kewarganegaraan harus diiringi dengan kemampuan guru memahami nilai-nilai yang berhubungan dengan isu tersebut. Guru diminta untuk lebih peka menunjukkan sisi afektif agar siswa tidak merasa monoton dan tetap merasa kehadiran guru.
- c) Keterampilan kewarganegaraan
Guru bertindak cepat dengan menemukan referensi yang sesuai dengan materi dan isu kewarganegaraan apabila ditemukan aspek-aspek yang perlu. Guru juga ditekankan tidak hanya memahami regulasi-regulasi yang cenderung bermunculan selama pandemi dan menjelaskan pada siswa tetapi juga melalui tindakan, seperti: bagaimana cara menghormati orang lain saat berkomunikasi secara daring. Hal ini juga menjaid pembelajaran bagi guru dan siswa pasca pandemi.

Lebih lanjut, *civic literacy* membantu guru memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya secara mental dan fisik untuk beradaptasi dalam pembelajaran pasca pandemi. Melalui *civic literacy* guru mampu mengaitkan isu-isu kewarganegaraan dengan materi pembelajaran dan memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis. Pada akhir penelitian terungkap bahwa penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru PPKn pada kondisi pasca pandemi berimplikasi pada peningkatan kepercayaan diri guru dan kompetensi profesionalisme guru.

Sehingga *civic literacy* dalam artikel ini dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan dan kemampuan guru dalam menghadapi dinamika politik kependidikan dan menginformasikan kepada

siswa secara ringan. Hal penting yang harus dilakukan guru dalam membentuk ketahanannya lewat *civic literacy* adalah dengan menempatkan dirinya dan siswa sebagai seorang warga negara yang perlu untuk terus belajar. Hal ini bertujuan agar guru memiliki kemampuan dalam menganalisis politik dan memandu siswa untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat serta negara. Meskipun pada dasarnya *civic literacy* juga dimaknai sebagai suatu kapasitas pengetahuan dan keterampilan warga negara dalam memahami teori dan aktivitas politik, namun secara lebih luas *civic literacy* dapat diartikan sebagai kompetensi pengetahuan dalam berpartisipasi dan melakukan perubahan di dalam komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran.

Penguatan *civic literacy* dilakukan dengan mengorganisir pengetahuan guru dan menuangkannya melalui materi pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Kompetensi *civic literacy* membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang lebih demokratis dan dapat mengaktifkan siswa berpendapat dalam pembelajaran baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Totok Suyantoa, 2018). Penguatan *civic literacy* juga berimplikasi pada terbentuknya guru-guru kreatif yang mampu menciptakan pembelajaran PPKn yang inovatif sehingga menghantarkan pada terbentuknya peserta didik yang *smart and good citizen*. *Civic literacy* juga dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan tentang bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam melakukan perubahan dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat demokratis yang dapat melaksanakan dan mengetahui fungsinya untuk menciptakan suatu perubahan yang damai.

KESIMPULAN

Penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru pada hakikatnya untuk mengoptimalkan kecerdasan guru dalam memilih dan memilih nilai-nilai, materi dan isu kewarganegaraan dalam pembelajaran. Penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru dalam pembelajaran PPKn pasca pandemi berguna untuk mewujudkan kompetensi guru dalam membentuk peserta didik sebagai warganegara yang baik dan cerdas dimana kompetensi publik tersebut mengharuskan setiap warga negara peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini juga berguna untuk memahami kompetensi pribadinya sesuai dengan profesi masing-masing serta menjunjung tinggi budaya luhur bangsa Indonesia sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila.

Penguatan *civic literacy* merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa, utamanya dalam menguatkan wawasan kebangsaan dengan membaca untuk membentuk pribadi *good citizen*. Permasalahan tersebut salah satunya adalah persoalan ketahanan guru yang mengalami pasang surut sebagai akibat dinamika kenegaraan, yaitu masa pandemi dan pasca pandemi. *Civic literacy* secara sederhana menjadi suplai pengetahuan dalam membangun bangsa, berfikiran luas mengenai wawasan kebangsaan, dan tentunya dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Penguatan *civic literacy* dalam membentuk ketahanan guru nantinya juga membentuk guru yang siap mengajar dalam segala kondisi kenegaraan untuk menghasilkan siswa yang kritis dan solutif. Guru-guru yang memiliki ketahanan baik diharapkan menjadi *pioneer* dalam bertindak untuk meluruskan perilaku masyarakat yang belum berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Almanshur, G. d. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Bachri, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Cholisin. (2010). Penerapan Civic Skills dan Civic Dispositions dalam Mata Kuliah Prodi PKn. *Diskusi Terbatas Jurusan PKn dan Hukum FIS*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dalimunthe, M. (2019). Pengelolaan Literasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Sabilarrsyad*, IV(1), 106-112.
- Dewi, D. A., & Budimansyah, D. (2020, March). The Effect of Civics Learning Implementation on Improving Civic Literacy in Digital Citizenship Era. In 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) (pp. 77-81). Atlantis Press.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 1-18.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). *Konsep Literasi Budaya dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *SKB Empat Menteri No 01/KB/2020 tentang pembelajaran tatap muka masa pandemi*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020, Maret 17). *SE Mendikbud: Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19*. Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pembelajaran-secara-daring-dan-bekerja-dari-rumah-untuk-mencegah-penyebaran-covid19>
- Martina, L. (2023). Pengembangan Civic Knowledge Melalui Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan. *Journal Of Civic Education*, 243-251.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monica Tiara, N. M. (2020). Collaboration of Pancasila and Civic Education Teachers and Guidance Counseling Teachers in the Developing of Student Characters in Senior High School. *Jurnal Etika dan Demokrasi*, 5(2), 256-263.
- Mthiyane, M. N. (2019). Adaptasi Guru Dalam Implementasi Pembelajaran Daring Di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (pp. 58-66). 3(2252).

Monica Tiara, Irwan, Muhajir. [Penguatan Civic Literacy dalam Membentuk Ketahanan Guru PPKn](#)

- Muhajir, R. M. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siri' na Pacce melalui Strategi Inkuiri pada Pembelajaran PPKn SMA. *INTEGRALISTIK*, 29-33.
- Novianto Puji Raharjo, B. W. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. *KOMUNIKA: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 33-44. Retrieved from www.kominfo.go.id/index.php/komunika
- Raharjo, A. A. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 23(2), 175-198. Retrieved from <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>
- Rahayu, P. P. (2020, April 4). "Merawat Kesehatan Mental dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Masa Pandemi". Retrieved from Universitas Nsional Karangturi: <https://unkartur.ac.id/merawat-kesehatan-mental-dalam-pembelajaran-jarak-jauh-pjj-di-masa-pandemi/8138/>
- Riskey Oktavian, R. F. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi Di Era Pendidikan 4.0. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 129-135.
- Sasongko, R. R. (2022). Pemanfaatan Google Slide dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PPKn. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* .
- Totok Suyantoa, K. P. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap kemunculan berita bohong di media sosial. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 52-61.
- Wafiq Mahmudi, R. F. (2021). Adaptasi Siswa Terhadap Pola Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif*, 4(3), 395-407.